



Proses Produksi Video Kegiatan Pemerintah Kota Bogor Di Akun Instagram @Pemkotbogor Sebagai Media Komunikasi Publik

Salma Dhiyayl Haq¹⁾; Guruh Ramdani²⁾

^{1,2)} Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB

Email: ¹⁾ dhiyaylsalma@apps.ipb.ac.id; ²⁾ guruh.r@apps.ipb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Mei 2026]

Revised [22 Juni 2026]

Accepted [26 Juni 2026]

KEYWORDS

Documentation, Public Communication, Video Production.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produksi video kegiatan Pemerintah Kota Bogor yang dipublikasikan melalui akun Instagram @pemkotbogor serta memahami peran video tersebut sebagai media komunikasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Divisi Broadcasting Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor. Analisis penelitian menggunakan konsep produksi audiovisual dari Gerald Millerson dan Jim Owens yang meliputi tahap pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi, serta didukung konsep Public Service Broadcasting untuk melihat fungsi video sebagai media pelayanan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi video dilakukan secara terstruktur mulai dari perencanaan konsep, persiapan peralatan, pengambilan gambar kegiatan pemerintah, hingga proses penyuntingan sebelum dipublikasikan melalui Instagram. Dalam prosesnya, Divisi Broadcasting tidak hanya memperhatikan aspek teknis audiovisual, tetapi juga kejelasan informasi dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang akurat dan mudah dipahami. Penelitian ini menunjukkan bahwa video kegiatan pemerintah yang dipublikasikan melalui Instagram @pemkotbogor berperan sebagai media komunikasi publik digital yang mendukung penyebaran informasi pemerintahan secara cepat, visual, dan mudah diakses masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to examine the video production process for Bogor City Government activities published via the @pemkotbogor Instagram account and to understand the role of these videos as a medium of public communication. This study employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation within the Broadcasting Division of the Information and Public Communication (IKP) Department at the Bogor City Communication and Information Agency (Diskominfo). The research analysis employs the audiovisual production framework by Gerald Millerson and Jim Owens, which encompasses pre-production, production, and post-production stages, and is supported by the concept of Public Service Broadcasting to examine the function of videos as a medium for public information services. The findings reveal that the video production process is conducted in a structured manner, beginning with conceptual planning, equipment preparation, filming of government activities, and editing before publication on Instagram. In this process, the Broadcasting Division not only focuses on audiovisual technical aspects but also on the clarity of information and the public's need for accurate and easily understandable public information. This study demonstrates that government activity videos published via the @pemkotbogor Instagram account serve as a digital public communication medium that supports the rapid, visual, and easily accessible dissemination of government information to the public.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola konsumsi informasi masyarakat. Audiens saat ini cenderung lebih memilih informasi yang disajikan secara visual dan audio visual karena dinilai lebih cepat dipahami, menarik, dan mudah diakses melalui berbagai platform digital (Candra & Winayanti, 2025). Pergeseran preferensi tersebut mendorong lembaga pemerintah untuk menyesuaikan strategi komunikasi publik agar tetap efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Nurika, et al., 2026). Salah satu bentuk komunikasi tersebut diwujudkan melalui video kegiatan pemerintahan.

Video kegiatan pemerintahan di media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah yang ditujukan dari pemimpin kepada masyarakat (Dunan, 2020). Unggahan dokumentasi kegiatan yang disebar melalui media sosial memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan kebijakan sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat untuk mendapatkan lebih banyak dukungan (Rakhmadani, 2022). Strategi ini memungkinkan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan citra positif di hadapan rakyat.

Konten video pendek kegiatan pemerintahan merupakan bagian dari strategi komunikasi institusional yang bertujuan untuk menunjukkan aktivitas, program, serta interaksi pemerintah dengan masyarakat (Nur & Mutia, 2022). Dokumentasi kegiatan berbentuk video memungkinkan penyampaian

informasi yang lebih komprehensif karena menggabungkan unsur visual, suara, dan narasi (Hilyati & Astuti, 2025). Elemen tersebut berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu kegiatan dipresentasikan kepada publik.

Salah satu lembaga pemerintah daerah yang memanfaatkan dokumentasi video sebagai sarana komunikasi publik adalah Pemerintah Kota Bogor. Saat ini, pemerintah Kota Bogor melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor konsisten mengunggah dokumentasi kegiatan pada akun Instagram @pemkotbogor, yang memiliki 196.200 pengikut aktif.

Video dokumentasi kegiatan pemerintah merupakan bukti administratif dan arsip visual yang mampu merepresentasikan kinerja pemerintah secara positif di mata masyarakat. Khususnya pada era digital, masyarakat bersifat lebih kritis terhadap informasi. Hal ini mendorong pemerintah kota untuk menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan audiens agar mendapatkan kepercayaan lebih. Oleh karenanya, produksi video dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Bogor dirancang melalui tahapan dan prosedur tertentu, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat sekaligus menunjukkan legitimasi citra pemerintah.

LANDASAN TEORI

Beberapa peneliti telah menulis terkait pemanfaatan Instagram oleh instansi pemerintahan. Abdilah dan Purnamasari (2024) meneliti pemanfaatan Instagram oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang sebagai sarana penyebaran informasi publik dalam penelitian “Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Instagram oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Instagram efektif digunakan untuk meningkatkan transparansi dan penyampaian layanan publik melalui konten yang dipublikasikan secara rutin. Namun, tingkat interaksi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar komunikasi pemerintah melalui media sosial dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Hilyati dan Astuti (2025) meneliti tentang proses produksi konten Instagram di Diskominfo Kota Sukabumi yang mencakup klarifikasi hoax, literasi digital, dan berita. Strategi konten Instagram yang digunakan oleh Diskominfo Kota Sukabumi sudah cukup efektif dalam menarik perhatian pengikut baru, meskipun interaksi dan engagement masih kurang signifikan. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan konsistensi publikasi konten, memperhatikan pesan yang disampaikan agar efektif, serta mempertahankan kreativitas dan terus berkembang dengan dinamika media sosial. Sementara itu, penelitian Nur dan Mutia (2022) membahas terkait model manajemen produksi video dokumentasi kegiatan DPRD Provinsi Riau yang dilakukan oleh staf Humas DPRD sebagai sarana informasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Riau. Proses produksi mencakup tahapan pengorganisasian, pelaksanaan produksi, serta tahapan kontrol dan evaluasi. Tahapan tersebut memungkinkan staf Humas DPRD Provinsi Riau untuk menetapkan tujuan, strategi, dan proses produksi video yang sesuai dengan kebutuhan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian Abdilah dan Purnamasari (2024) serta Hilyati dan Astuti (2025) mengenai akun media sosial pemerintah umumnya berfokus pada efektivitas penyebaran informasi publik, strategi pengelolaan konten, serta tingkat interaksi audiens pada platform Instagram. Sementara itu, penelitian Nur dan Mutia (2022) telah membahas model manajemen produksi video dokumentasi, namun hanya terpusat pada manajemen produksi dokumentasi internal. Oleh karenanya, penelitian ini akan membahas tentang proses produksi video kegiatan Pemerintah Kota Bogor di Instagram @pemkotbogor dengan meninjau tahapan pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi dalam mendukung komunikasi publik pemerintah di media sosial.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Produksi Audiovisual yang dikemukakan oleh Gerald Millerson dan Jim Owens (2009). Teori ini awalnya digunakan untuk produksi program televisi. Seiring berkembangnya media digital, teori ini beradaptasi untuk mengkaji produksi konten di media sosial, seperti Instagram. Menurut Millerson dan Owens (2009), ada tiga tahapan dalam produksi konten audiovisual, yaitu: pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Tahapan pra-produksi melibatkan tahapan awal sebelum video diproduksi, seperti perencanaan konsep dan visual, riset, serta pembuatan naskah. Tahapan produksi mencakup kegiatan shooting atau pengambilan di lapangan, perekaman voice over, serta koordinasi untuk memastikan kualitas video. Proses ini diakhiri dengan tahapan pasca-produksi yang berupa penyuntingan, evaluasi, dan publikasi.

Setelah menganalisis data wawancara tentang tahapan produksi dokumentasi audiovisual, temuan akan dikaitkan dengan teori Public Service Broadcasting (PSB). PSB merupakan suatu teori yang menekankan bahwa media harus melayani kepentingan publik melalui informasi yang akurat, edukatif, mudah diakses, dan bertanggung jawab (Hendy, 2013). Public Service Broadcasting berangkat dari suatu gagasan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk melayani warga, memperkuat demokrasi, dan menyediakan ruang informasi bagi seluruh masyarakat yang tidak ditentukan oleh logika komersial



(Banerjee & Seneviratne, 2005). Teori ini sesuai dengan praktek publikasi dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Bogor untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, yaitu menyebarkan informasi kegiatan, kebijakan, layanan, dan kondisi aktual kepada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya (Rachman et al., 2023). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dan komprehensif terhadap objek yang diteliti, yaitu proses produksi konten kegiatan pemerintah Kota Bogor di Instagram @pemkotbogor.

Lokasi pengambilan data dilakukan secara offline di Diskominfo Kota Bogor yang berlokasi Jl. Ir. H. Juanda No.10, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Data penelitian diambil selama masa magang dengan durasi lima bulan, mulai dari Januari 2026 hingga Mei 2026. Data adalah informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu (Siregar et al. 2022). Penelitian ini akan disusun dengan mengumpulkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari peran sebagai divisi broadcasting Diskominfo Kota Bogor secara langsung, termasuk observasi dan wawancara di lapangan. Data sekunder diperoleh dari sumber eksternal melalui referensi, seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota divisi broadcasting bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor, serta sumber pendukung dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi daftar pertanyaan yang disusun untuk diajukan kepada Divisi Broadcasting Diskominfo Kota Bogor guna memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, produksi, hingga publikasi konten video pada berbagai platform media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akun Instagram @pemkotbogor merupakan salah satu media komunikasi publik yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Proses dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Bogor merupakan tugas dari Divisi *Broadcasting*, yang bernaung dalam Bidang IKP Diskominfo Kota Bogor.

Berdasarkan UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, *broadcasting* didefinisikan sebagai proses pemancarluasan siaran melalui sarana pemancara atau transmisi menggunakan spektrum frekuensi radio yang dapat diterima secara serentak oleh masyarakat melalui perangkat seperti radio atau televisi (Republik Indonesia, 2002). Saat ini, definisi *broadcasting* di era digital dapat diperluas menjadi proses penyebaran konten audio, video, atau informasi secara serentak ke audiens melalui saluran seperti radio, tv, transmisi digital, atau media sosial (Hutabarat, 2022).

Dokumentasi kegiatan di Instagram memungkinkan pemerintah kota untuk menyebarkan informasi mengenai program kerja, kegiatan lapangan, serta perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengelolaan akun Instagram juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat (Hilyati & Astuti, 2025).

Pemerintah Kota Bogor melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor memanfaatkan praktik *broadcasting* di media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi publik melalui produksi dan penyebaran video kegiatan pemerintahan. Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor berperan dalam merencanakan, memproduksi, serta mendistribusikan konten audiovisual kegiatan pemerintah kota dengan menyesuaikan karakteristik platform digital, khususnya Instagram.

Menurut Millerson dan Owens (2009), ada tiga tahapan dalam memproduksi konten audiovisual, yaitu: pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Tiga tahapan tersebut diimplementasikan dalam proses pembuatan video kegiatan Pemerintah Kota Bogor yang akan diunggah ke Instagram @pemkotbogor, dengan rincian seperti di tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Produksi Video Dokumentasi

No	Tahapan	Tugas Divisi Broadcasting
1	Pra-produksi	Koordinasi dengan bidang terkait untuk membuat video dokumentasi, mengadakan meeting internal, menjadwalkan waktu <i>shooting</i> , membuat <i>brief</i> konten.
2	Produksi	Mempersiapkan kamera dan perangkat audio yang dibutuhkan, merekam suasana kegiatan dan tokoh yang terlibat di lokasi.
3	Pasca-produksi	Penyuntingan video, <i>review</i> oleh atasan dan bidang terkait, penayangan konten di Instagram, evaluasi.

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2026

Jika dikaitkan dengan teori produksi audiovisual yang dikemukakan oleh Millerson dan Owens (2009), media audiovisual memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara efektif karena menggabungkan unsur visual dan audio yang dapat memperkuat pesan komunikasi. Dalam konteks komunikasi publik pemerintahan, video kegiatan yang dipublikasikan melalui Instagram tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi yang mampu menjelaskan aktivitas pemerintah secara lebih jelas dan informatif. Hal ini sejalan pula dengan penelitian Nur & Mutia (2022) yang mengungkapkan bahwa dokumentasi kegiatan merupakan salah satu cara pemerintah dalam memberi informasi tentang hal yang sudah dikerjakan oleh pemangku kepentingan yang disampaikan kepada khalayak. Dengan demikian, konten video yang diproduksi oleh Diskominfo Kota Bogor berperan dalam memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Bidang IKP Diskominfo Kota Bogor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan melalui akun Instagram tersebut telah melalui proses verifikasi sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena media sosial memiliki jangkauan audiens yang luas dan beragam, sehingga informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat (Kumar & Shah, 2018). Oleh karena itu, setiap konten video yang diunggah harus disusun dengan memperhatikan pesan utama yang ingin disampaikan kepada publik.

Akurasi informasi merupakan salah satu indikator penting dalam *Public Service Broadcasting*, di mana media harus menyampaikan pesan secara akurat dan terbukti kebenarannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara masyarakat (Masduki, 2022). Bidang IKP Diskominfo Kota Bogor bersama dengan Divisi *Broadcasting* telah berupaya untuk memastikan informasi yang dipublikasikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Public Service Broadcasting* yang menunjukkan bahwa media publik memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses oleh masyarakat luas (Curran, et. al., 2009).

Tahapan Pra-Produksi

Tahap pra-produksi merupakan proses awal dalam produksi video yang berfungsi untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum kegiatan pengambilan gambar dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor, proses ini umumnya diawali dengan adanya penugasan dari pimpinan, baik dari kepala bidang IKP maupun Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Selain itu, apabila terdapat permintaan dokumentasi dari dinas atau instansi lain di lingkungan pemerintah daerah, permohonan tersebut harus disampaikan secara resmi melalui surat kepada Bidang IKP.

Pada tahap ini, tim *broadcasting* mulai menyusun konsep produksi yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan diliput melalui *production planning meeting*. Penyusunan konsep ini dapat berupa pembuatan naskah atau gambaran alur visual yang akan ditampilkan dalam video. Naskah biasanya disusun dengan format *storyboard*, yang mencakup visual dari *footage* yang akan ditampilkan, narasi, *voice over*, serta tulisan di layar. Hal ini membantu pengambilan gambar menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan video. Apabila kegiatan yang diliput merupakan dokumentasi kegiatan lapangan, maka konsep yang dibuat akan menyesuaikan dengan *brief* dari instansi pemerintah yang mengajukan permintaan dokumentasi, dengan mempertahankan pesan utama yang ingin disampaikan melalui kegiatan tersebut.



Tim *Broadcasting* juga mempersiapkan berbagai peralatan produksi yang diperlukan untuk mendukung proses peliputan. Dalam praktiknya, Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor menyiapkan perangkat seperti kamera Canon EOS R5 dengan lensa *wide* dan *ultrawide*, *smartphone*, serta perangkat audio nirkabel untuk mendukung kualitas dokumentasi kegiatan pemerintah kota.

Persiapan tersebut sejalan dengan teori produksi audiovisual yang menyatakan bahwa tahap pra-produksi merupakan fase perencanaan yang sangat penting karena menentukan arah produksi secara keseluruhan. Pada tahap ini, berbagai aspek seperti konsep visual, kebutuhan teknis, serta peralatan produksi harus dipersiapkan secara matang agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. (Millerson & Owens, 2009)

Selain aspek teknis produksi, proses perencanaan dalam pembuatan video dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Bogor menunjukkan adanya orientasi pelayanan publik. Hal ini terlihat dari upaya Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor untuk memastikan visual yang akan ditampilkan sejalan dengan pesan utama yang akan disampaikan mulai dari tahap perencanaan hingga saat produksi di lapangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Public Service Broadcasting* yang menekankan pentingnya kejelasan informasi sebelum konten dipublikasikan kepada masyarakat (Hendy, 2013).

Tahapan Produksi

Tahap produksi merupakan proses pelaksanaan pengambilan gambar secara langsung di lokasi kegiatan. Dalam tahap ini, Divisi *Broadcasting* bertanggung jawab untuk mendokumentasikan berbagai momen penting yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Proses pengambilan gambar dilakukan dengan tujuan untuk merekam aktivitas pemerintahan secara jelas sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat tergambarkan secara utuh melalui video yang dipublikasikan.

Dalam proses peliputan kegiatan pemerintah kota, tim berupaya menampilkan dua aspek utama, yaitu sisi formal dan sisi humanis dari kegiatan pemerintahan. Misalnya, ketika meliput kegiatan yang melibatkan Wali Kota Bogor, tim tidak hanya menampilkan aktivitas resmi pemerintah, tetapi juga interaksi antara pejabat pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar dokumentasi kegiatan tidak hanya menampilkan aktivitas formal pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan warga kota.

Teknik pengambilan gambar yang digunakan juga menyesuaikan kebutuhan visual dalam produksi video. Kamera dengan lensa *ultrawide* dimanfaatkan untuk menangkap situasi yang lebih luas, seperti keramaian kegiatan, aktivitas masyarakat, serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. Sementara itu, kamera dengan lensa *wide* digunakan untuk mengambil gambar yang lebih detail, seperti ekspresi tokoh, potret warga, maupun pernyataan resmi dari pemerintah. Pengambilan gambar menggunakan teknik *close up* dan *medium shot* dengan jarak 30 cm – 1 m dari objek. Jarak aman dari objek atau tokoh termasuk fleksibel dan bisa berubah-ubah tergantung kebutuhan pengambilan gambar.

Pada tahapan ini, Divisi *Broadcasting* mengupayakan untuk mengambil gambar sebanyak-banyaknya dari berbagai sudut sebagai stok *footage* pada tahap penyuntingan. Tim harus memastikan untuk mengambil setiap momen krusial pada saat pengambilan gambar. Percakapan dari para pemimpin atau tokoh masyarakat harus direkam juga secara keseluruhan agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Rekaman *footage* dan audio yang lengkap ketika turun lapangan dapat sangat membantu ketika proses editing, sebab dapat memberikan banyak opsi sudut pengambilan gambar serta memudahkan dalam memilah momen yang harus ditonjolkan dalam video. Strategi ini menunjukkan bahwa Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor sangat menekankan pentingnya variasi visual dan kualitas gambar dalam mendukung efektivitas penyampaian pesan dari video dokumentasi kegiatan pemerintah, sejalan dengan prinsip produksi audiovisual Millerson dan Owens (2009) yang menekankan pentingnya variasi komposisi gambar dalam menyajikan informasi visual.

Dalam konteks komunikasi publik pemerintah, visual yang ditampilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai sarana representasi informasi publik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses produksi video kegiatan pemerintah yang tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika visual, melainkan juga mempertimbangkan kebermanfaatan informasi bagi publik dengan mengambil gambar dalam kegiatan selengkap mungkin. Dengan demikian, visual yang ditampilkan di video kegiatan Pemerintah Kota Bogor mempertimbangkan kelengkapan informasi yang dapat membantu masyarakat memahami konteks kegiatan pemerintah lebih jelas.

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *Public Service Broadcasting* yang menempatkan media sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat (Masduki, 2022). Media pelayanan publik tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun transparansi melalui representasi visual yang mampu memperlihatkan realitas secara lebih dekat kepada audiens (Bock & Lazard, 2022).

Tahapan Pasca-Produksi

Tahapan pasca-produksi merupakan proses pengolahan materi visual yang telah direkam pada tahap produksi. Dalam tahap ini, editor bertugas untuk menyusun dan menyunting berbagai footage yang telah diperoleh dari proses peliputan kegiatan. Proses penyuntingan dimulai dengan melakukan seleksi terhadap footage yang dianggap paling relevan dengan konsep konten yang telah direncanakan sebelumnya.

Editing video dilakukan di aplikasi CapCut, sebab eksekusi dokumentasi kegiatan pemerintah cenderung sederhana dan tidak banyak menggunakan efek visual yang rumit. Proses *editing* biasanya diawali dengan tahap *rough cut*, yaitu penyusunan awal dari berbagai potongan gambar yang telah direkam. Pada tahap ini, editor menentukan bagian mana saja yang akan dimasukkan ke dalam video akhir. Setelah itu, proses penyuntingan dilanjutkan dengan penyesuaian urutan gambar, pemotongan footage yang tidak diperlukan, serta penyesuaian durasi video agar sesuai dengan karakteristik platform Instagram. Pada tahapan *fine cut*, editor menambahkan transisi sederhana agar pergantian tiap potongan *footage* menjadi lebih halus. Pada tahapan *final cut*, video diekspor dalam format 1080P hingga 4K untuk memastikan kualitas video yang jernih ketika akan diunggah di Instagram.

Konsep penyuntingan yang digunakan oleh Divisi Broadcasting Diskominfo Kota Bogor cenderung sederhana dan tidak menggunakan efek visual yang berlebihan. Hal ini dilakukan agar pesan utama dari kegiatan yang didokumentasikan tetap tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan pandangan Millerson dan Owens (2009) yang menyatakan bahwa proses editing dalam produksi audiovisual bertujuan untuk menyusun materi visual secara logis dan efektif sehingga mampu mendukung penyampaian pesan komunikasi secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens.

Setelah penyuntingan selesai, video tersebut akan melalui tahap *review* oleh atasan dan bidang terkait, untuk memastikan konten layak tayang di Instagram. Jika masih ada bagian yang masih kurang sesuai, baik dari sisi pengambilan gambar atau editing, video akan direvisi. Setelah tahapan ini, video dokumentasi kegiatan akan diunggah ke Instagram.

Tahapan pasca-produksi yang dilakukan Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor menunjukkan bahwa dokumentasi video kegiatan pemerintah tidak terlalu bergantung pada estetika visual, namun fokus utama terletak pada kejelasan pesan dan penyampaian informasi publik. Ini menunjukkan upaya Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor dalam menyeimbangkan informasi dan daya tarik visual dari proses penyuntingan yang sederhana. Hal ini sejalan dengan konsep *Public Service Broadcasting*, bahwa media publik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi formal, tetapi juga harus menyampaikan pesan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat (Curran et.al., 2009). Media pelayanan publik di era digital juga perlu menggabungkan unsur informatif dan daya tarik media agar pesan lebih mudah tersampaikan kepada audiens modern.

Kendala dan Upaya dalam Produksi Video Kegiatan Pemerintah

Selama proses produksi video dokumentasi kegiatan pemerintah kota, Divisi *Broadcasting* Diskominfo Kota Bogor menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses produksi. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kurang jelasnya *brief* atau konsep awal dari pihak yang mengajukan permintaan dokumentasi kegiatan. Hal ini menyebabkan tim *broadcasting* perlu menyesuaikan kembali konsep produksi agar konten yang dihasilkan tetap sesuai dengan tujuan kegiatan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, kondisi di lapangan terkadang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Beberapa kejadian yang tidak terduga dapat memengaruhi hasil dokumentasi yang diperoleh oleh tim *broadcasting*. Dalam beberapa kasus, momen yang diharapkan untuk didokumentasikan tidak dapat diperoleh secara optimal karena situasi di lapangan berubah dari rencana awal kegiatan.

Faktor lain yang juga menjadi tantangan dalam proses produksi adalah kondisi cuaca di Kota Bogor yang sering berubah, seperti hujan berkepanjangan atau suhu panas yang dapat memengaruhi kinerja peralatan produksi, misalnya menyebabkan kamera mengalami *overheat*. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Divisi *Broadcasting* berupaya meningkatkan kualitas produksi dengan terus mengikuti perkembangan tren produksi video di media sosial, khususnya Instagram, serta berupaya menyajikan informasi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Upaya ini sejalan dengan pandangan Gerald Millerson dan Jim Owens bahwa keberhasilan produksi audiovisual tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan teknik produksi, tetapi juga oleh kemampuan tim produksi dalam beradaptasi terhadap berbagai situasi yang terjadi selama proses produksi berlangsung.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Divisi Broadcasting Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Bogor menunjukkan peran yang terstruktur dan cermat dalam setiap tahapan produksi video kegiatan pemerintah, mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi. Keseluruhan proses dilakukan secara selektif agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dengan demikian, video dokumentasi kegiatan pemerintah yang dipublikasikan melalui Instagram @pemkotbogor tidak hanya berfungsi sebagai arsip kegiatan, tetapi juga sebagai media informasi publik yang informatif dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Saran

Penelitian kualitatif ini menekankan kepada aspek produksi teknis konten dokumentasi kegiatan, sehingga hasil yang didapatkan merupakan pemahaman terhadap keseluruhan proses produksi, namun belum mencakup respon dari audiens. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan terhadap penerimaan audiens agar hasil yang didapatkan lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai proses produksi audiovisual di media sosial pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, S., & Purnamasari, H. (2024). Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Instagram oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 334–350. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3682>
- Banerjee, I., & Seneviratne, K. (Eds.). (2006). *Public service broadcasting in the age of globalization*. AMIC.
- Bock, M. A., & Lazard, A. (2022). Narrative transparency and credibility: First-person process statements in video news. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 28(3), 888-904.
- Candra, N., & Winayanti, R. (2025). Analisis Penggunaan Konten Visual di Media Sosial untuk Membangun Brand Awareness: Tinjauan Literatur Sistematis. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(2), 881-886. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.10006>
- Curran, J., Iyengar, S., Brink Lund, A., & Salovaara-Moring, I. (2009). Media System, Public Knowledge and Democracy: A Comparative Study. *European Journal of Communication*, 24(1), 5-26.
- Dunan, Amri. (2020). Government Communications in Digital Era: Public Relation and Democracy. *Jurnal Pekommas*. 5. 71. [10.30818/jpkm.2020.2050108](https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108).
- Hasanah, S. L., Razzaq, A., & Hati, P. C. (2025). Strategi Humas Diskominfo Kota Palembang Dalam Mengelola Keterbukaan Informasi Publik. *Komunika: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.70437/komunika.v3i1.1559>
- Hendy, D. (2013). *Public service broadcasting*. Bloomsbury Publishing.
- Hilyati, S. I., Astuti, V. F. (2025). Produksi Konten Visual Dan Audiovisual Instagram Pemerintah: Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sukabumi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 9(5), 268-278.
- Hutabarat, P. M. (2022). Tren Dan Kebutuhan Talenta Penyiaran Pada Kehumasan Pemerintah di Era Digital, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 4(8), 97-104.
- Kumar, S., Shah, N. (2018). False Information on Web and Social Media: A Survey. <https://doi.org/10.1145/nnnnnnnn.nnnnnnn>
- Masduki, M. (2022). Public service broadcasting model in Indonesian transitional democracy. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.35761>
- Millerson G, Jim Owens. 2009. *Television Production*. London: Focal Press.
- Nur, J. & Mutia, T. 2022. Model Manajemen Produksi Video Dokumentasi Kegiatan DPRD Provinsi Riau. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 6, 306-317.
- Nurika, S. P., Aiyanti, N. Y., Utaridah, N., Kartika, T., & Putra, P. (2026). Membangun Citra Pemerintah melalui Media Sosial: Strategi Komunikasi Pemprov Lampung di Era Digital. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 10(1), 203-213. <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i1.4834>

- Pratiwi, D. A. & Fitriani, D. R. 2021. Government Public Relations Pada Diskominfo Kota Depok dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Untuk Mencapai Good Governance. AGUNA: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume I, No. 2, 79 – 90.
- Rachman A., Yochanan E., Samanlangi, A.I., Purnomo, H. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Saba Jaya Publisher
- Rakhmadani, R. (2022). Implementasi Model Komunikasi Dua Arah Dalam Program Curhat Ning Ita Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto. The Commecium, 5(1), 159–168. <https://doi.org/10.26740/tc.v5i1.45328>
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. 2022. Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, 69 – 75.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Penyiaran (2002). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.